



Kemitraan Australia Indonesia Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan

Pemulihan Pasca Bencana di Aceh dan Nias (2005–08)





Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



Kemitraan Australia Indonesia Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan

Pemulihan Pasca Bencana di Aceh dan Nias (2005–08)

© Commonwealth of Australia 2008

Hak cipta dilindungi undang-undang. Selain untuk penggunaan sebagaimana yang diijinkan berdasarkan *Undang-undang Hak Cipta 1968*, dilarang memperbanyak dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Commonwealth. Permohonan dan pertanyaan yang berkaitan dengan memperbanyak dan hak harus dialamatkan ke Commonwealth Copyright Administration, Attorney-General's Department, Robert Garran Offices, National Circuit, Barton ACT 2600, atau diposkan ke www.ag.gov.au/cca

ISBN 978-1-921285-59-2

Disiarkan oleh Lembaga Australia untuk Pembangunan Internasional, Canberra, Nopember 2008.

Dokumen ini tersedia di:
www.ausaid.gov.au/publications

Untuk information lebih lanjut tentang program bantuan luar negeri Australia, silahkan hubungi:
Communications Section

AusAID
GPO Box 887
Canberra ACT 2601
Phone +61 2 6206 4000
Facsimile +61 2 6206 4880
Internet www.ausaid.gov.au

Dirancang oleh GRiD Canberra
Dicetak oleh Bluestar

Sampul: Industri perikanan yang dibinasakan oleh tsunami sudah dibangun lagi. Penurunan kapal laut adat. Foto: AusAID

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
Latar Belakang	3
Rancangan dan pendekatan program	5
Tujuan dan prinsip-prinsip program	6
Laporan tentang hasil dari berbagai sektor	7
Kesehatan	7
Pendidikan	9
Infrastruktur dan perumahan	11
Tata pemerintahan	13
Mata pencaharian	15
Nias	17
Transisi menuju pembangunan berkelanjutan	19



Dengan kehidupan yang berangsur kembali normal setelah tsunami dan konflik 30 tahun, masyarakat Aceh semakin optimis akan masa depan mereka. Foto: M. Anshar

Ringkasan Eksekutif

Tiga setengah tahun setelah tsunami 2004 yang terjadi sehari setelah Hari Natal (Boxing Day), rekonstruksi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah menunjukkan hasil yang nyata. Masyarakat pulih dan berkembang. Anak-anak telah kembali ke sekolah-sekolah yang sudah dibangun kembali. Meskipun luka fisik, ekonomi dan emosi dari gempa bumi dan tsunami itu masih tetap membekas, rekonstruksi Propinsi NAD berjalan dengan baik, dan kehidupan kota Banda Aceh telah berdenyut kembali siang dan malam.

Di sepanjang wilayah pantai barat yang mengalami kerusakan paling parah, kini berderet rumah-rumah baru dan balai desa-balai desa, sekolah-sekolah dan klinik-klinik kesehatan dengan cat yang masih baru. Kota Calang, yang lebih dari 80 persen penduduknya tewas akibat dari bencana tersebut dan sempat tidak dapat diakses melalui jalur darat, kini memiliki beberapa pasar, rumah makan, warung kopi dan sebuah hotel baru. Jalanan sedang diperbaiki dan jembatan-jembatan sedang dibangun.

Masa depan masyarakat Aceh juga lebih positif menyusul berhentinya konflik yang sudah berlangsung selama 30 tahun. Masyarakat sekarang dapat melakukan berbagai perjalanan ke seluruh pelosok propinsi tersebut tanpa harus mengkhawatirkan keselamatannya berkat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Demobilisasi, Demiliterisasi dan Reintegrasi pada Agustus 2005. Menurut salah seorang mantan aktivis: "...ini adalah waktu yang paling baik di Aceh dalam 30 tahun terakhir".

Di Aceh dan Nias, Pemerintah Australia menyumbangkan lebih \$250 juta dalam bentuk bantuan tanggap darurat dan rekonstruksi, termasuk sumbangan yang signifikan dalam bentuk paket bantuan sebesar \$1 miliar bagi Indonesia—dikenal sebagai Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD).

Bantuan yang sangat dibutuhkan ini telah mendukung pemulihan masyarakat dalam berbagai cara, termasuk rekonstruksi infrastruktur publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan pelabuhan di Banda Aceh. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Australia difokuskan pada konsolidasi investasi untuk rekonstruksi fisik dengan membantu masyarakat Aceh mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan agar berbagai perbaikan di sektor-sektor ini terus berkelanjutan.

Korban jiwa yang diakibatkan oleh tsunami sangat menghantam sektor kesehatan dan pendidikan karena tewasnya ribuan dokter, perawat dan guru. Australia, melalui Badan Pembangunan Internasional Australia (AusAID), telah menyediakan pelatihan untuk membangun kembali keterampilan-keterampilan yang hilang ini, termasuk 230 tenaga kerja rumah sakit, ribuan perawat dan bidan, serta 1750 guru. Fasilitas pelatihan teknis dan sistem pengelolaan yang baru telah disediakan agar dapat menghasilkan generasi-generasi baru yang profesional di sektor-sektor ini, yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sangat berkualitas.

AusAID juga telah bekerja bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat di wilayah-wilayah yang dihantam tsunami untuk membuat 'layanan satu pintu' agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat lebih transparan dan efektif

dari sebelumnya. Pemilihan kepala desa telah direvitalisasi dengan bantuan Pemerintah Australia, dan proses pemilihan umum telah ditingkatkan sedemikian rupa sehingga pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang mereka ambil. AusAID juga telah bekerja sama dengan penduduk di pulau Nias untuk memulihkan infrastruktur penting masyarakat dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga dan mengelola infrastruktur tersebut.

Bantuan Australia juga telah memainkan peranan penting meskipun kecil dalam membantu masyarakat agar dapat kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dalam sektor budidaya air, AusAID telah bekerja sama dengan para petani dan para pekerja sukarela pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian seperti udang. Pemerintah Australia juga mempekerjakan ribuan warga Aceh dalam proyek-proyek rekonstruksinya, dan telah melatih para pekerja bangunan lokal dalam hal pembangunan dan pengembangan rumah sehingga mereka dapat membangun dan mengembangkan perumahan dengan kualitas yang lebih baik.

Namun demikian, kerusakan yang diderita Aceh dan Nias akibat salah satu bencana alam yang paling mematikan dalam sejarah modern ini tidak dapat diremehkan. Begitu juga dampak yang diderita oleh masyarakat akibat konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun. Rekonstruksi sedang dijalankan, tapi masih banyak isu terkait dengan konflik tersebut yang masih belum terselesaikan. Mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), misalnya, sebagian besar masih belum memiliki pekerjaan. Selain itu, masih terjadi berbagai ketegangan di Aceh terkait dengan distribusi sumber daya yang tidak merata di seluruh propinsi tersebut akibat tingginya tingkat aliran bantuan ke daerah-daerah yang dihantam tsunami. Mendukung stabilitas dan perdamaian serta membangun kembali masyarakat masih menjadi tantangan yang signifikan bagi masyarakat Aceh, pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat madani dan donor-donor internasional.

Pekerjaan tersebut masih jauh dari selesai. Australia berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Aceh lebih dari sekedar upaya rekonstruksi, dan mengarahkan propinsi tersebut menuju era kemakmuran yang baru.

Laporan ini merinci prestasi-prestasi yang dicapai dalam program rekonstruksi Australia di Aceh dan Nias, serta menunjukkan masa depan yang positif bagi propinsi tersebut.

Total Pengeluaran Australia di Aceh dan Nias (hingga Juni 2008)

Sumber Komitmen Pendanaan	Total komitmen (\$ juta)	Dikeluarkan hingga Juni (\$ juta)
Bantuan darurat Kemanusiaan—AusAID	34,4	34,4
Bantuan darurat kemanusiaan—Departemen Pemerintahan Australia lainnya (terutama Pertahanan di bawah 'Operation Sumatra Assist')	37,4	37,4
AIPRD Komitmen Proyek Aceh dan Sumatra Utara	181,0	154,9
Program Rehabilitasi Aceh untuk memulihkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemerintahan daerah (\$80 juta)		
Infrastruktur masyarakat (\$25 juta)		
Mata pencaharian—memulihkan budi daya air dan tanaman panen (\$5 juta)		
Penelitian dan pelatihan pendidikan (\$3 juta)		
Perumahan dan tempat tinggal sementara (\$10 juta)		
Membangun kembali sekolah di daerah konflik (\$10 juta)		
Pengembangan usaha daerah (\$7 juta)		
Bantuan infrastruktur dan teknis masyarakat Nias (\$10 juta)		
Pemetaan udara (\$10 juta)		
Pelabuhan Ulee Lheue (\$8 juta)		
Bantuan makanan kemanusiaan (\$10 juta)		
Bantuan teknis untuk memperbaiki tata pemerintahan (\$3 juta)		
Total	252,8	226,7

* Semua angka dolar adalah dalam dolar Australia, kecuali jika dinyatakan yang lain

Latar Belakang

Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 telah menyebabkan kehancuran yang sangat dahsyat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), propinsi yang berlokasi di ujung barat Indonesia. Diperkirakan 167.000 jiwa melayang dan sekitar 500.000 kehilangan tempat tinggal. Sekitar 800 kilometer sepanjang garis pantai hancur dan lebih dari 3.000 hektar lahan tersapu bersih atau terendam air laut. Pelabuhan, jalan dan jembatan juga mengalami kehancuran. Ribuan sekolah, fasilitas kesehatan dan sumber air hancur atau rusak, dan sumber-sumber mata pencaharian penduduk lokal berkurang.

Pulau Nias mengalami dampak ganda dari tsunami dan gempa bumi yang sangat kuat pada 28 Maret 2005. Pulau tersebut—telah menghadapi berbagai kesulitan karena terisolasi dan kurangnya peluang untuk memperoleh pendapatan yang memadai, sumber daya manusia yang terbatas dan buruknya infrastruktur—kehilangan 11 pelabuhan, 403 jembatan dan lebih dari 1.000 kilometer jalan lokal dan propinsi.



Diatas: Pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyerahkan senjata-senjata mereka tahun 2005 menyusul ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MOU) yang mengakhiri konflik sipil 30 tahun. Foto: AP/AAP/Binsar Bakhara

Kiri: Pemerintah Australia merespon secara cepat dan tepat terhadap bencana, dengan memberikan lebih dari \$250 juta untuk

Dalam beberapa hari setelah bencana tersebut, Australia mengumumkan paket bantuan lima tahun sebesar \$1 milyar kepada Indonesia.

Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD), yang dikelola bersama oleh pemerintahan kedua negara tersebut, telah mendukung berbagai upaya rekonstruksi dan pembangunan di dalam dan di luar daerah-daerah yang terdampak tsunami.

Pemerintah Australia merespon dengan cara yang cepat dan bermurah hati terhadap bencana tersebut. Para personil departemen pertahanan, perawat, dokter, petugas logistik dan pekerja sukarela adalah beberapa diantara tim-tim pertolongan yang pertama kali tiba di Aceh. Beberapa hari setelah terjadinya bencana tersebut, Australia berkomitmen untuk bekerja bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak bagi mereka yang selamat dan mulai menempatkan orang-orang kami serta arsitektur institusional untuk menangani tugas-tugas rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat besar pada masa-masa selanjutnya.

Dalam beberapa hari setelah bencana tersebut, Australia mengumumkan paket bantuan lima tahun sebesar \$1 milyar kepada Indonesia. Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD), yang dikelola bersama oleh pemerintahan kedua negara tersebut, telah mendukung berbagai upaya rekonstruksi dan pembangunan di dalam dan di luar daerah-daerah yang terdampak tsunami.

Pemerintah Australia berkomitmen untuk menyediakan lebih dari \$250 juta bagi upaya darurat dan rekonstruksi Sumatera Utara. Ini termasuk \$181 juta dalam dana AIPRD untuk berbagai aktifitas rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias. Warga Australia juga secara sukarela menyumbangkan lebih dari \$350 juta untuk program bantuan dan rekonstruksi akibat tsunami yang dijalankan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Program Pemerintah Australia di Aceh difokuskan pada sektor-sektor yang paling kritis bagi rekonstruksi: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, mata pencaharian dan tata pemerintahan. Ini termasuk pembangunan kembali berbagai fasilitas kemasyarakatan seperti bangsal darurat di rumah sakit utama di Banda Aceh, klinik-klinik kesehatan, sekolah-sekolah, dan balai-balai desa di seluruh propinsi. Bantuan pemerintah Australia juga membantu mengatasi berkurangnya tenaga-tenaga terampil akibat tsunami yang merenggut jiwa ribuan dokter, perawat, guru dan pegawai pemerintahan.

Sejak tsunami tersebut, peluang yang nyata muncul ke permukaan bagi terjadinya perdamaian dan pembangunan di Aceh. Propinsi itu pulih tidak hanya dari bencana tsunami tapi juga dari konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebelum tsunami, diperkirakan 1,2 juta orang (28,5 persen) hidup di bawah garis kemiskinan. Kemampuan untuk menyediakan dan mengelola pelayanan lemah dan terpecah-pecah.

Pada 2004, NAD adalah propinsi termiskin keempat di Indonesia. Dua tahun setelah tsunami tingkat kemiskinan bertambah parah, sehingga NAD menjadi propinsi termiskin kedua di Indonesia. Tingkat kemiskinan saat ini mengalami peningkatan berkat proses perdamaian dan upaya yang rekonstruksi yang dilakukan.¹

Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menghasilkan peletakan senjata oleh pihak GAM, demobilisasi ribuan mantan tahanan politik dan pejuang, serta penarikan ribuan pasukan dan polisi dari Aceh.

Pada Desember 2006, mantan pemimpin GAM terpilih sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam melalui pemilihan umum yang damai. Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman itu, kepercayaan antara kedua belah pihak meningkat kembali. Selain itu, sejak disetujuinya Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh pada 2006, Aceh telah memperoleh otonomi ekonomi dan politik. Tantangan bagi Aceh sekarang adalah untuk mengelola kekuasaan dan tanggung jawab yang sangat besar yang telah diberikan ke daerah.

Laporan ini memberikan sebuah gambaran mengenai berbagai kemajuan dari program rekonstruksi Australia di Aceh dan Nias, mengambil pelajaran dari upaya rekonstruksi yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan membahas transisi AusAID menuju pekerjaan pembangunan yang terus berlangsung di propinsi tersebut.

¹ World Bank, 2008. *Aceh Poverty Assessment 2008: The Impact of the Conflict, the Tsunami and Reconstruction on Poverty in Aceh*, Jakarta.

Rancangan dan pendekatan program

Setelah keadaan darurat yang diakibatkan oleh tsunami terkendali di Aceh, besarnya tantangan teknis, logistik, sosial dan peraturan menjadi tampak sangat jelas. Ketika jumlah korban jiwa terus meningkat dan besarnya kerusakan dan kerugian diketahui, terlihat bahwa upaya untuk merekonstruksi sekolah-sekolah, jalan-jalan, pelabuhan-pelabuhan dan rumah-rumah hanyalah sebagian dari pekerjaan yang harus dilakukan dalam perkembangan selanjutnya. Mengembangkan kembali kemampuan tenaga kerja Aceh juga sama menantangannya, karena ribuan dokter, guru, perawat, dan pegawai pemerintahan yang tewas secara tragis. Setiap sektor di Aceh sangat membutuhkan bantuan.

Ratusan donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat datang ke Aceh dengan milyaran dolar bantuan untuk rekonstruksi. AusAID berencana untuk memberikan respon yang signifikan untuk jangka pendek dan menengah, terhadap bencana tersebut dalam lingkungan kerja yang sulit.

Karena konflik selama 30 tahun di Propinsi tersebut, Program Rehabilitasi Aceh dimulai hampir dari 'titik nol'. Sebelum tsunami, hanya ada sedikit donor atau LSM yang bekerja di Aceh, tidak ada perencanaan mengenai apa yang akan dibangun, tidak ada pekerja di lapangan dan tidak ada rantai pasokan.

Kemitraan Australia dengan Indonesia menjadi titik awal bagi pelaksanaan upaya-upaya AusAID di Aceh. AIPRD membuat sebuah perjanjian baru demi kemitraan pembangunan yang lebih erat antara Pemerintah Australia dan Indonesia. AIPRD memformalkan komitmen pemerintah-ke-pemerintah bagi kemitraan pada tingkat yang paling tinggi.

AusAID mengambil pendekatan yang pragmatis untuk mengembangkan seperangkat program yang secara keseluruhan dipadukan menjadi Program Rehabilitasi Aceh. Agar efektif, program-program yang diperlukan untuk merespon lingkungan yang berubah tersebut mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat berfungsi dengan baik dan tetap fleksibel.

Kemitraan formal dan informal dikembangkan pada setiap tingkatan. Keputusan-keputusan yang terkait dengan alokasi dana dibuat oleh Komisi Gabungan yang diawasi oleh Perdana Menteri Australia dan Presiden Indonesia, serta menteri luar negeri dan menteri perekonomian kedua negara. Penasehat yang bekerja bersama para pejabat pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rekonstruksi. Para manajer program sektor ditempatkan di kantor-kantor pemerintah propinsi, dan sebuah jaringan yang luas dari staf-staf lokal yang dipekerjakan oleh AusAID bekerja pada tingkat desa.

Pendekatan ini dihargai oleh Pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh. Australia menjadi dikenal sebagai mitra yang mengerti kebutuhan Aceh dan dapat diminta secara formal ketika ada tantangan yang harus diatasi.



Diatas: Masyarakat Aceh melihat ke masa depan.
Foto: R. MacColl

Paling atas: Aceh setelah bencana.
Foto: R. MacColl

Tujuan dari Program Rehabilitasi Aceh adalah untuk memberikan sumbangan bagi pemulihan dan pengembangan Aceh dan Nias dengan cara-cara yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi orang-orang dan masyarakatnya.

Tujuan dan prinsip-prinsip program

Tujuan dari Program Rehabilitasi Aceh adalah untuk memberikan sumbangan bagi pemulihan dan pengembangan Aceh dan Nias dengan cara-cara yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi orang-orang dan masyarakatnya.

Untuk memastikan bahwa tujuan ini tercermin dalam semua kerja AusAID, lima prinsip ditetapkan untuk menjadi panduan untuk merancang dan mengembangkan bantuan Australia di Aceh:

1. Bekerja bersama dengan pemerintah di tingkat pusat dan pemerintah di tingkat propinsi

Kemitraan resmi antara pemerintah Australia dan Indonesia memastikan bahwa AusAID meminta keterlibatan Indonesia sejak awal dan berkesinambungan dalam mengembangkan dan menyediakan program rekonstruksi. Program-program yang dijalankan melalui sistem-sistem yang ada, yang dalam prosesnya membangun kembali dan memperkuat program tersebut. Apabila memungkinkan, tim-tim AusAID ditempatkan di kantor-kantor pemerintahan daerah.

2. Mencari dan memberi dana pelengkap untuk memperkuat hasil program pembangunan

Bukan kurangnya dana tapi masalah-masalah logistik dan perencanaan yang rumit lah yang menyebabkan berbagai kesulitan dan memperlambat rekonstruksi. AusAID bekerja untuk melengkapi program pemerintah Indonesia dan negara donor lainnya dan secara strategis menjembatani kesenjangan yang menghambat kemajuan.

3. Fokus pada layanan-layanan yang sangat penting

AusAID fokus pada sektor-sektor yang memberikan pelayanan yang sangat penting pada masyarakat. Pelatihan guru dan perawat, pembangunan kembali sekolah, penyediaan peralatan dan sumber daya yang sangat penting, serta perampingan proses administratif dari pemerintah daerah, memiliki dampak yang segera terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada korban tsunami.

4. Menargetkan masyarakat yang paling rentan dan miskin

AusAID bekerja keras untuk mempertahankan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu, dan kemudian pada penemuan cara untuk menerapkan gagasan-gagasan yang baik. AusAID dengan cepat mengerahkan dan menempatkan banyak penasehat di lembaga-lembaga lokal (pemerintahan dan masyarakat sipil) untuk mengumpulkan informasi mengenai berbagai kebutuhan, mencari tempat yang tepat agar bantuan AusAID bisa sangat membantu, dan mengembangkan sebuah program dari sana.

5. Bekerja di area di mana AusAID memiliki keunggulan yang sebanding

Meskipun AusAID tidak memiliki program bantuan di Aceh dan di daerah-daerah lain di Indonesia sebelum tsunami, Australia memiliki banyak pengalaman di daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan secara hati-hati menggabungkan kemampuan-kemampuan AusAID dengan tim penasehat Aceh, AusAID dapat menyesuaikan metode pendekatan yang telah berhasil dengan lingkungan Aceh secara khusus.

Laporan tentang hasil dari berbagai sektor

Program Rehabilitasi Aceh dimulai pada Januari 2005 sebagai program rekonstruksi jangka menengah. AusAID mengembangkan berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, tata pemerintahan, mata pencaharian bagi daerah-daerah yang terkena bencana di Aceh dan di pulau Nias, yang fokus pada hasil-hasil berikut:

- > pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh dimana mereka memiliki kepercayaan diri
- > infrastruktur dan peralatan yang digunakan dengan baik dan terpelihara
- > tata pemerintahan—masyarakat dan pemerintah yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- > mata pencaharian—struktur dan sistem pendukung yang membantu pertumbuhan ekonomi.

Kunci keberhasilan Australia di sektor-sektor ini akan dijelaskan secara rinci pada bagian ini.

Kesehatan

Komitmen	\$28,2 juta
Perkiraan pengeluaran hingga Juni 2008	\$28,1 juta

Kerusakan

Konflik yang telah berlangsung selama tiga dekade, yang diperburuk oleh dampak akibat tsunami, membuat kondisi pelayanan dan infrastruktur kesehatan sangat mengkhawatirkan dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan provinsi tersebut secara memadai. Lebih dari 120 fasilitas kesehatan hancur atau rusak. Rumah sakit utama Aceh, Rumah Sakit Zainoel Abidin, rusak parah akibat tsunami dan 10% dari staf kesehatannya hilang atau dinyatakan tewas. Paling sedikit 7 rumah sakit lainnya dan 11 pusat kesehatan propinsi hancur.

Salah satu sumbangan terpenting Australia selama 2007 adalah pembangunan fasilitas untuk melatih dan menciptakan para profesional di bidang kesehatan di masa yang akan datang di Aceh.

Ringkasan pencapaian

- > memulihkan unit gawat darurat di Rumah Sakit Zainoel Abidin
- > menata kembali sistem administrasi di Rumah Sakit Zainoel Abidin
- > mendirikan laboratorium kesehatan di Universitas Syiah Kuala dan Rumah Sakit Zainoel Abidin untuk melatih para profesional kesehatan di masa yang akan datang
- > meningkatkan proses pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat propinsi
- > meningkatkan kualitas empat klinik kesehatan dan merekonstruksi akademi kebidanan
- > merekonstruksi dua gudang farmasi dan membangun kembali rantai pasokan obat-obatan



Australia telah membantu memulihkan layanan kesehatan di Aceh.

Kanan: Infrastruktur fisik seperti bangsal gawat darurat rumah sakit utama di Banda Aceh. Foto: M. Anshar

Diatas: Memulihkan dan meningkatkan fasilitas pelatihan seperti akademi kebidanan. Foto: AusAID



- > merenovasi bangunan dan laboratorium di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banda Aceh
- > memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi lebih dari 230 staf rumah sakit
- > menyerahkan lebih dari 3,700 beasiswa bagi siswa-siswi keperawatan, bidan dan kedokteran.

Pengelolaan pelayanan kesehatan provinsi diperkuat melalui bantuan terarah dalam perencanaan dan anggaran departemen.

Pencapaian 2007-08

Australia merespon dengan cepat kebutuhan di sektor kesehatan dengan memperbaiki unit gawat darurat Rumah Sakit Zainoel Abidin—rumah sakit terbesar di Aceh. Fasilitas ini sekarang sudah sepenuhnya pulih dan merawat lebih dari 1.000 pasien setiap bulannya. Pelayanan kesehatan terus ditingkatkan melalui pelatihan bagi para pekerja kesehatan.

Pengelolaan pelayanan kesehatan provinsi diperkuat melalui bantuan terarah dalam perencanaan dan anggaran departemen. Dengan bantuan Australia, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh diperbaharui dan rencana strategis pertama dan rencana aksi kesehatan Aceh sedang dijalankan.

Salah satu sumbangan terpenting Australia selama 2007 adalah pembangunan fasilitas untuk melatih dan menciptakan para profesional di bidang kesehatan di masa yang akan datang di Aceh.

Para mahasiswa diploma jurusan kesehatan sekarang dapat belajar bagaimana menggunakan berbagai teknik dan peralatan yang paling modern di Indonesia di laboratorium yang dibangun di Universitas Syiah Kuala. Laboratorium itu akan melatih sekitar 1000 mahasiswa setiap tahunnya, dengan jumlah lulusan sekitar 200 setiap tahunnya.

Mahasiswa pasca sarjana akan mempelajari kasus-kasus kehidupan nyata di Universitas Syiah Kuala. Selain itu, Australia juga mendukung renovasi laboratorium lingkungan dan mikrobiologi, laboratorium gizi, dan bangunan administrasi utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Banda Aceh.

Pendidikan

Komitmen	\$45,25 juta
Perkiraan pengeluaran hingga Juni 2008	\$36,3 juta

Dampak Kerusakan

Tsunami telah meluluhlantakkan sektor pendidikan di NAD. Lebih dari 2100 sekolah hancur atau rusak, termasuk lebih dari 1500 sekolah dasar, hampir 300 sekolah menengah pertama, dan taman kanak-kanak, sekolah teknik dan kejuruan serta sekolah-sekolah tinggi. Sekitar 2500 guru dan 38.000 tewas dalam bencana tersebut dan 150.000 siswa kehilangan akses ke fasilitas pendidikan. Bencana ini menyusul konflik di Aceh yang sudah berlangsung selama 30 tahun, yang telah mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan. Selama periode ini banyak guru yang menolak bekerja di daerah-daerah yang terkena konflik dan diperkirakan sekitar 900 sekolah dihancurkan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.



Kiri dan dibawah: Pekerjaan Australia di sektor pendidikan akan terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan partisipasi murid, terutama murid perempuan.
Foto: R. MacColl

Bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membangun kembali sekolah-sekolah

Pemerintah Australia telah menyediakan \$2,65 juta untuk mendukung pembangunan sebuah sekolah di Suak Timah, yang akan menyediakan pendidikan bagi anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama di daerah tersebut.

Masyarakat dari area tersebut turut terlibat dalam merencanakan dan mengawasi proses pembangunan tersebut dalam dua tahun terakhir, dan menyumbangkan lapangan sepak bola masyarakat untuk dijadikan lokasi pembangunan sekolah baru.

Pemimpin masyarakat Tgk H Abdulla Agam mengatakan bahwa masyarakat ingin memberikan kepada anak-anak mereka sebuah awal yang baru setelah tsunami dengan menyediakan bagi mereka sebuah sekolah dan masa depan melalui pendidikan.

“Sekolah berkualitas ini sekarang menjadi tempat mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kami dan tempat bagi masyarakat untuk berkumpul,” katanya.



Ringkasan pencapaian

- > peningkatan pengelolaan sekolah dan aset dengan:
 - merenovasi 84 sekolah melalui bantuan-bantuan kecil
 - pelatihan untuk 101 sekolah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan mengelola anggaran dan sumber daya
- > menyelesaikan rekonstruksi 13 sekolah dan tiga fasilitas administrasi pendidikan
- > terus merenovasi 43 sekolah dasar di daerah-daerah yang terdampak oleh konflik
- > menyerahkan 11.000 buku bagi perpustakaan-perpustakaan sekolah
- > membantu pelaksanaan Rencana Strategis Pendidikan Provinsi NAD
- > meningkatkan kualitas pelayanan pengajaran melalui pengembangan profesionalisme 1750 guru
- > menyediakan pelatihan bagi hampir 1.000 anggota komite sekolah dan pejabat pendidikan pemerintah di daerah-daerah yang terkena konflik
- > mengembangkan bahan-bahan pelatihan bagi tiga lembaga pelatihan pra jabatan guru sekolah dasar
- > menyediakan pelatihan dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi 231 anggota staf perempuan di sekolah-sekolah Islam.

Pencapaian 2007-08

Diperkirakan hingga saat ini lebih dari 80.000 anak telah memperoleh manfaat dari bantuan Australia bagi sektor pendidikan.

Pada awalnya, perhatian difokuskan pada pembangunan kembali bangunan-bangunan sekolah, pusat pelatihan guru di universitas lokal dan dua dinas pendidikan. AusAID kemudian fokus pada penguatan administrasi dan penyediaan pelayanan pendidikan yang merevitalisasi program pengelolaan berbasis sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Pemerintah daerah terus menawarkan program pelatihan bagi para guru dan kepala sekolah yang didasarkan pada manual-manual yang dibuat dengan bantuan AusAID. Perguruan tinggi daerah menerima bantuan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk meningkatkan kurikulum pelatihan guru. Lebih dari 900 guru akan mendapatkan manfaat dari berbagai peningkatan ini setiap tahunnya.

Di beberapa daerah dimana standar dan kualitas pendidikan telah terdampak oleh konflik separatisme selama beberapa dekade, AusAID menyatukan kembali masyarakat yang telah terpecah-pecah melalui isu tentang pendidikan. Pendekatan ini telah meningkatkan jumlah kehadiran siswa dan guru, serta ikatan desa yang lebih erat dan pembuatan keputusan yang lebih inklusif. Program ini telah menghasilkan lingkungan desa yang lebih stabil dan damai. Bantuan ini akan terus berlangsung selama 2009.

Australia juga bekerja untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi-posisi pembuatan keputusan dalam komite sekolah. Hasilnya sangat mengagumkan, jumlah perwakilan perempuan di sebagian besar komite sekolah meningkat sebesar hampir 40 persen. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial berhasil mengurangi konflik dan meningkatkan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.

Diperkirakan lebih dari 80,000 anak menerima manfaat bantuan Australia di sektor pendidikan.

Infrastruktur dan perumahan

Komitmen	\$27,5 juta
Perkiraan pengeluaran hingga Juni 2008	\$20,4 juta

Kerusakan

Sekitar 85 persen dari semua infrastruktur di Banda Aceh hancur oleh gempa bumi dan tsunami. Dengan lebih dari setengah juta penduduk kehilangan tempat tinggal, sekitar 120.000 rumah permanen baru diperlukan.

Pelabuhan utama Aceh menanggung kehancuran terbesar akibat tsunami dan menjadi benar-benar terpisah dari daratan ketika dermaganya tersapu. Kerusakan pada lebih dari 3.000 kilo meter jalan, 120 jembatan dan 14 pelabuhan memutuskan akses ke banyak daerah pesisir pantai. Infrastruktur ini harus dibangun kembali untuk memastikan adanya pasokan kebutuhan dan bahan dasar bagi rekonstruksi.



Diatas: Australia mencairkan hibah kecil bagi masyarakat untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni dan mengembangkan program pemeliharaan. Foto: AusAID

Kiri: Pembangunan Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Foto: AusAID

Ringkasan pencapaian

- > membantu memperbaiki pelabuhan Ulee Lheue, termasuk pembangunan sebuah terminal feri permanen
- > membangun lebih dari 1200 tempat tinggal sementara, dan melengkapinya dengan air dan sanitasi
- > meningkatkan keterampilan lebih dari 470 pekerja bangunan Aceh yang terlibat dalam upaya rekonstruksi
- > menyatukan para pekerja bangunan dan pakar teknis dalam berbagai tim untuk membantu lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan komitmen pembangunan rumah mereka

- > membantu Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dan LSM untuk mempercepat rekonstruksi perumahan permanen
- > membangun kembali batas-batas lahan lebih dari 88.000 kavling lahan agar pembangunan rumah dapat dimulai
- > melatih 203 pejabat desa dan memberikan peralatan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada rumah dan melakukan pemeliharaan
- > mencairkan bantuan-bantuan keuangan kecil kepada 45 warga untuk memperbaiki rumah-rumah yang sudah tidak bisa dihuni dan membuat program pemeliharaan
- > membangun kembali 175 balai desa.

Pencapaian 2007-08

Berkat bantuan Australia untuk memperbaiki pelabuhan utama Aceh di Ulee Lheue, saat ini 900 penumpang melakukan transit di terminal tersebut setiap harinya, meningkat 50 persen sejak 2005. Australia juga membangun sebuah terminal feri permanen baru bagi para petugas administrasi pelabuhan dan banyak usaha kecil dengan sebuah tempat berteduh yang luas bagi para penumpang.

Australia juga memberikan kepada Pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi rekonstruksi lainnya peta digital yang rinci untuk lebih dari 14.400 kilo meter persegi daerah pantai Aceh dan Nias serta kepulauan Simeulue. Peta-peta ini masih terus digunakan untuk perencanaan rekonstruksi dan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pada topografi Aceh. AusAID juga membantu Pemerintah Indonesia memetakan aset-aset yang sudah direkonstruksi agar aset-aset tersebut dapat dialihkan kepada badan-badan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya dalam jangka panjang.

Pembangunan kembali balai-balai desa juga menjadi prioritas, dengan 175 fasilitas baru yang direkonstruksi. Fasilitas-fasilitas baru tersebut dirancang melalui konsultasi langsung dengan masyarakat dan para pemimpin desa, dan telah menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat desa.

Pemerintah Indonesia telah memberikan indikasi bahwa sejak April tahun ini, cukup banyak rumah yang sudah dibangun kembali. Namun, kualitas beberapa diantaranya masih menjadi isu. Berbagai isu mengenai kualitas sebagian merupakan hasil dari industri konstruksi Aceh yang dipaksa melampaui kemampuannya dikarenakan jumlah rekonstruksi yang sangat banyak.

Para penasehat Australia memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) menyelesaikan berbagai tantangan dalam sektor perumahan, dengan fokus pada isu-isu seperti memberi penjelasan kepada para penerima dan membuat sistem penjaminan kualitas. Para pekerja bangunan, tukang pipa dan tukang listrik diberi pelatihan bersertifikat pemerintah di tempat kerja dan di ruangan kelas mengenai rekonstruksi perumahan.

Australia membantu LSM membangun rumah-rumah permanen untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat pembangunan, dan merangsang masyarakat untuk mengambil peranan yang lebih aktif dalam pembangunan rumah. Masyarakat diberi pelajaran mengenai standar kualitas bangunan agar mereka dapat memonitor pembangunan dan membantu mendapatkan rumah-rumah berkualitas baik dari penyedia rumah. Hal ini didukung oleh program bantuan kecil sebesar \$1,5 juta untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil di rumah-rumah yang baru dibangun di 45 desa yang mengalami dampak paling buruk.

Pembangunan kembali balai-balai desa juga menjadi prioritas, dengan 175 fasilitas baru yang direkonstruksi. Fasilitas-fasilitas baru tersebut dirancang melalui konsultasi langsung dengan masyarakat dan para pemimpin desa, dan telah menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat desa.

Tata Pemerintahan

Komitmen	\$47,9 juta
Perkiraan pengeluaran hingga Juni 2008	\$42,7 juta

Kerusakan

Tsunami dan konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun telah benar-benar mengurangi kemampuan Pemerintah NAD untuk merespon kebutuhan masyarakat dan menyediakan pelayanan. Tsunami dan konflik tersebut juga telah melemahkan hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Banyak pemimpin pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan dan lebih dari 5.000 pejabat publik tewas dalam bencana tsunami tersebut. Peralatan dan kertas kerja tersapu, bangunan kantor pemerintahan hancur dan penyedia layanan benar-benar lumpuh total. Akibatnya respon tersebut membutuhkan tidak hanya rekonstruksi bangunan tapi juga pelatihan bagi para pegawai yang baru diangkat.

Ringkasan pencapaian

- > menyediakan pelatihan khusus bagi lebih dari 700 petugas pemerintahan daerah mengenai kepemimpinan, perencanaan, pembuatan anggaran, penyelesaian konflik dan transparansi
- > menerapkan model penyediaan layanan ‘layanan satu pintu untuk merampingkan penyediaan layanan publik di 51 pemerintahan kecamatan—sekarang sedang dicoba diterapkan di seluruh NAD
- > membangun tujuh kantor kecamatan
- > memfasilitasi pemilihan kepala dan dewan desa secara demokratis di 270 desa (dua kepala desa perempuan terpilih untuk pertama kalinya di Aceh)
- > melatih 2300 orang sebagai pemimpin masyarakat (lebih dari setengahnya perempuan) di 204 desa.

Kanan: Tingkat kesadaran masyarakat akan proses pemilu dan peran mereka dalam masyarakat demokrasi membantu memperbaiki kualitas dan transparansi layanan pemerintah.
Foto: AusAID

Kiri: Australia membantu merampingkan layanan rekonstruksi pemerintah melalui layanan satu pintu—masyarakat Aceh kini bisa mendapatkan berbagai jenis layanan dari satu tempat secara cepat, murah dan transparan.
Foto: AusAID





Para perempuan menjadi peserta aktif dalam pemilu langsung yang pertama kalinya terjadi di Aceh tahun 2006—termasuk pemberian suara dan pencalonan diri—serta partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan akan terus didukung. Foto: AusAID

Mendukung partisipasi perempuan dalam proses politik

Di kabupaten Aceh Jaya, tiga perempuan berdiri untuk pemilihan kepala desa. Di desa Tuwi Kayee, Ibu Tasyariah, seorang ibu dengan lima anak, melakukan kampanye dengan baik.

Visinya tentang desa tersebut terangkum dalam tiga tujuan utamanya: (i) memperluas peranan perempuan di desa tersebut; (ii) membangun desa yang sehat dan sejahtera; dan (iii) memperkuat spiritualitas desa. Pembangunan pasar dan jalan umum desa yang menuju ke sawah adalah prioritas utama Ibu Tasyariah. 'Pasar lama terbakar selama terjadinya konflik dan sekarang masyarakat desa harus pergi ke pasar Panga untuk berbelanja,' ujar Ibu Tasyariah setelah ia memenangkan pemilihan. 'Untuk populasi 218, pembangunan jalan umum sangat penting untuk mendukung bidang pertanian.

Australia mendukung kegiatan yang meningkatkan kesadaran para pemegang hak suara dan memberikan dukungan khusus untuk para wanita agar unjuk gigi dalam pemilihan tersebut dan memegang peranan kunci kepemimpinan, termasuk kursus-kursus pelatihan dalam pembuatan keputusan masyarakat.

Zainab, seorang wanita yang memberikan suara di Desa Mon Mata, di kecamatan Setia Bakti, ucapkan itulah pertama kali bahwa pilihan kepala desa dikelola secara baik, "Kebelakangan ini, kami pergi di balai desa untuk melihat siapa yang dicalonkan saja, lalu memilih suatu orang. Sekarang, kami mengerti bagaimana siapa dipilih dan apa yang dia akan lakukan sebagai kepala desa.'

Pencapaian 2007-08

Australia terus bekerja untuk memperkuat masyarakat dan pelayanan pemerintah daerah serta membangun keterkaitan yang lebih kuat. Australia menargetkan pelatihan keterampilan khusus di tingkat kecamatan. Lebih dari 700 pejabat pemerintahan daerah dilatih dalam hal kepemimpinan, keterampilan dalam bidang teknologi informasi, perencanaan, pembuatan anggaran, negosiasi dan penyelesaian konflik.

Australia juga mendukung para pejabat yang memiliki komitmen untuk membuat 'layanan satu pintu' untuk memberikan pelayanan pemerintahan pada tingkat kecamatan. Mereka kini dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang terkait dengan alokasi perumahan, bantuan kesejahteraan dan pendaftaran kelahiran, kematian dan perkawinan dengan biaya yang lebih murah, lebih cepat dan lebih transparan dibanding sebelumnya. Sistem ini benar-benar berhasil sehingga pemerintahan kecamatan di seluruh propinsi menggunakan anggaran mereka untuk meniru perubahan ini.

Australia melatih 2300 anggota masyarakat dari 204 desa untuk memimpin proses perencanaan dan rekonstruksi desa. Pelaksanaan 730 rencana peningkatan kualitas desa akan membuat desa-desa ini mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri seperti memperoleh akses untuk mendapatkan air bersih, peralatan pertanian, penerangan, perawatan anak, dan pelayanan serta sumber daya yang sangat penting lainnya.

Pada 5 September 2007, masyarakat kabupaten Aceh Jaya berhasil mencetak sejarah dengan menjadi kabupaten pertama yang menyelenggarakan beberapa pemilihan kepala desa secara langsung dan bersamaan. Australia bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Aceh Jaya mempersiapkan peraturan pemilihan dan mendukung proses pemilihan tersebut dengan menjelaskan peraturan dan prosedurnya serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan tersebut.

Dengan mendukung pemilihan yang bebas dan adil di tingkat daerah, Australia memberikan sumbangan pada peningkatan pelayanan pemerintah. Warga sekarang menyadari hak dan kewajibannya untuk membuat agar kepala desa mereka bertanggung jawab dalam hal transparansi pemerintah dan pemberian pelayanan.

Mata pencaharian

Komitmen	\$22,1 juta
Perkiraan pengeluaran hingga Juni 2008	\$21,2 juta

Kerusakan

Tsunami menghancurkan sumber-sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat daerah pesisir di Aceh, memperparah kondisi ekonomi yang sudah lama rusak akibat konflik yang sempat berlangsung selama 30 tahun. Budi daya air adalah industri daerah yang tumbuh dengan baik dan mendukung lebih dari 100.000 pemilik di propinsi tersebut hingga akhirnya tsunami menghancurkan kolam dan pembudidayaan udang di propinsi tersebut. Kerusakan pada infrastruktur, cadangan ikan di pesisir pantai dan kesuburan tanah di sepanjang 800 kilometer garis pantai Aceh sangat besar. Air laut dan sediment membanjiri garis pantai, termasuk tanah pertanian.

Rangkuman pencapaian

- > meningkatkan panen udang sebesar 30 persen untuk para peserta dalam proyek yang didanai Australia, dan mengurangi penggunaan pestisida hingga 60 persen
- > merekonstruksi tempat pembudidayaan utama di Aceh dan pusat pelatihan bagi para petani tambak udang
- > membangun laboratorium sementara di fasilitas budi daya air teknis yang utama di Aceh untuk mendukung para staf untuk menyebarkan praktek pengelolaan akuakultur yang lebih baik
- > melatih 2890 klien bisnis di seluruh Aceh dan Nias dalam perencanaan bisnis, saran pemasaran, dan pengelolaan keuangan
- > membuat fasilitas pendaftaran secara online untuk meningkatkan pelayanan hotel di daerah
- > membentuk 27 kelompok kredit mikro desa untuk membantu mengembangkan mata pencaharian dan inisiatif-inisiatif wirausaha kecil seperti tambak ikan dan udang, taxi sepeda motor, rumah makan kecil dan jahit pakaian
- > melatih 81 pekerja pertanian untuk memberikan saran kepada para petani mengenai praktek-praktek pengelolaan tanah yang baik untuk budi daya tanaman.

Membantu orang untuk kembali bekerja merupakan hal yang sangat penting untuk memulihkan kecukupan diri para korban tsunami dan merupakan langkah penting untuk memastikan agar kedamaian di Aceh berkelanjutan. Dan saat peluang kerja terkait dengan rekonstruksi mulai melemah, memastikan bahwa mantan pejuang memiliki mata pencaharian alternatif yang mana penting untuk stabilitas jangka panjang propinsi tersebut.

Pencapaian 2007-08

Kemitraan Usaha Swasta untuk Aceh dan Nias yang didanai oleh Australia memberikan pelayanan berupa saran untuk membantu usaha kecil dan menengah meningkatkan lingkungan bisnis mereka, memulihkan mata pencaharian di sektor-sektor yang strategis seperti budi daya air, meningkatkan akses untuk mendapatkan dana dan meningkatkan ketersediaan pelayanan pengembangan bisnis.

Membantu orang untuk kembali bekerja merupakan hal yang sangat penting untuk memulihkan kecukupan diri para korban tsunami dan merupakan langkah penting untuk memastikan agar kedamaian di Aceh berkelanjutan. Dan saat peluang kerja terkait dengan rekonstruksi mulai melemah, memastikan bahwa mantan pejuang memiliki mata pencaharian alternatif yang mana penting untuk stabilitas jangka panjang provinsi tersebut.

Aceh adalah penghasil udang yang utama. Sebelum tsunami, produksi udang tersebut mendukung lebih dari 100.000 pemilik usaha kecil—salah satu hasil komoditas yang

Membantu mantan pejuang memiliki mata pencaharian

Pekerjaan Australia dalam di sektor budidaya air telah memainkan peranan penting dalam mendukung upaya perdamaian di Aceh dengan menyediakan alternatif mata pencaharian bagi para mantan pejuang. Ismail Muhammad, petani dari desa Samuti Krueng di Bireuen, adalah mantan komandan GAM yang menjadi peserta dalam program pemulihan udang yang didanai oleh Australia pada 2007. Sebagai bagian dari program, ia menerima pelatihan tentang bagaimana mengelola tambaknya dengan lebih baik.

Usaha Ismail terbayar. Pada panen udang pertamanya, total produksi yang dia peroleh adalah 414 kilo gram udang galah besar. Dia menjual hasil penennya tersebut untuk mendapatkan keuntungan hampir \$1500 di lokasi di mana rata-rata pendapatan per bulannya adalah \$110. Ismail sangat senang dengan hasil yang diperoleh: “Saya punya hasil panen yang sangat baik, keuntungan yang bagus dan ukuran udang yang bagus.”

Seorang penambak udang asal Aceh membawa pulang udang jenis Monodon, termasuk jenis terbaik di dunia. Berkat dukungan dan pelatihan dari pusat budi daya air di Aceh – yang dibangun kembali oleh Australia – hasil panen mereka meningkat dan siap untuk dipasarkan. Foto: IFC



menghasilkan uang di Aceh. Untuk membantu menggairahkan kembali industri tersebut, Australia melalui program Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR) telah membangun tempat pembudidayaan udang dan membangun kembali pusat pelatihan bagi para produsen udang. Praktek pengelolaan yang lebih baik telah membantu beberapa petani udang untuk menggandakan pendapatannya dengan meningkatkan hasil pertaniannya.

Departemen Perikanan Aceh akan mensosialisasikan praktik pengelolaan yang lebih baik pada para petani di seluruh propinsi tersebut. Diharapkan hasil yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan tersebut akan menarik para investor untuk memproses udang di Aceh.

Dana Australia juga digunakan untuk meningkatkan budi daya air di Aceh dengan merehabilitasi fasilitas teknisnya di propinsi tersebut. Ini mencakup rehabilitasi infrastruktur di fasilitas tersebut dan bekerja bersama-sama dengan para staf disana untuk mengembangkan keterampilan mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan teknis industri budi daya air di daerah tersebut.

Australia telah bekerja sama dengan para petani dan pekerja penyuluhan budi daya air untuk memulihkan kesuburan tanah agar para petani dapat kembali menghasilkan beras dan tanaman komoditas lainnya seperti kacang dan kacang kedelai. Hasil panen telah meningkat berkat penerapan teknik-teknik yang sudah dikembangkan. Pelatihan telah diberikan kepada 81 pekerja penyuluhan budi daya air pemerintah daerah yang pada gilirannya akan melatih para petani—dampak yang menghasilkan keuntungan ini diharapkan terus menyebar keuntungan dari teknik-tekniknya yang sudah diperbaharui ini ke seluruh daerah yang terkena tsunami.

AusAID dan International Finance Corporation membuka Investor Outreach Office pada Maret 2007 sebagai bagian dari program \$7 juta tersebut untuk mendorong investasi sektor swasta di Aceh. Program tersebut mendukung 40 investor dan memberikan pelatihan bisnis pada 800 orang.

Nias

Komitmen	\$10,0 juta
Pengeluaran hingga June 2008	\$6,2 juta

Kerusakan

Setelah tsunami pulau Nias menderita pukulan kedua dari gempa bumi yang terjadi pada 28 Maret 2005. Dampak dari kedua bencana tersebut, ditambah lagi dengan dampak ekonomi akibat kondisi geografis yang terisolasi, telah membuat Nias menjadi salah satu daerah termiskin di Indonesia. Australia memberikan kontribusi pada pemulihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur masyarakat dan memulihkan pelayanan pemerintah daerah. Bantuan Australia untuk Nias akan terus berlangsung pada tahun-tahun mendatang.

Ringkasan pencapaian

- > mendukung 96 proyek infrastruktur masyarakat skala kecil termasuk jalan-jalan akses, jembatan-jembatan, jembatan-jembatan suspensi, dinding penahan dan infrastruktur pasokan air—34 proyek tuntas dan 62 proyek lainnya akan dituntaskan pada Januari 2009
- > memfasilitasi lokakarya perencanaan masyarakat di 57 desa untuk memetakan kebutuhan infrastruktur masyarakat dan tujuan pembangunan di masa yang akan datang
- > merekonstruksi sepuluh kantor kecamatan—enam akan selesai pada Oktober 2008 dan empat akan selesai pada Maret 2009
- > melatih pejabat pemerintahan di empat kecamatan untuk mengelola dan memelihara infrastruktur.

Bantuan Australia di kabupaten Nias Selatan— kabupaten termiskin di Nias— mendukung proyek-proyek skala kecil yang dirancang untuk membangun kembali infrastruktur masyarakat seperti jembatan, akses jalan, dinding pengendali erosi, dan fasilitas air dan sanitasi.



Australia membantu masyarakat Nias Selatan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mendanai prasarana masyarakat kecil. Foto ini menunjukkan sistem pembuangan air yang dibangun di desa Hilindrasonih, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Foto: Elfrietz Berkani, AusAID.

Pencapaian 2007-08

Bantuan Australia di kabupaten Nias Selatan—kabupaten termiskin di Nias—mendukung proyek-proyek skala kecil yang dirancang untuk membangun kembali infrastruktur masyarakat seperti jembatan, akses jalan, dinding pengendali erosi, dan fasilitas air dan sanitasi. Masyarakat mengidentifikasi proyek-proyek ini sebagai prioritas dan membangun infrastrukturnya sendiri. Dalam prosesnya, anggota masyarakat diajarkan konsep-konsep dasar tentang manajemen proyek dan keuangan. Warga desa memperoleh keuntungan baik melalui berbagai peluang kerja yang terkait dengan penerapannya ataupun secara langsung melalui peningkatan infrastruktur.

Meskipun skalanya kecil, proyek-proyek ini menghasilkan peningkatan yang substansial bagi warga masyarakat di desa-desa ini. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih baik ke sekolah, pelayanan pemerintah, layanan darurat dan pasar. Fasilitas air dan sanitasi membantu mengurangi penyakit, terutama pada anak-anak. Akses yang lebih baik untuk mendapatkan air sangat membantu para wanita—mereka dapat menghemat waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk mengangkut air ke rumah-rumah mereka, mereka kini punya lebih banyak waktu untuk memberikan kontribusi dalam aktivitas-aktivitas yang produktif.

Australia sedang membangun kembali kantor pemerintahan kecamatan dan menyediakan bantuan teknis bagi pemerintahan-pemerintahan kecamatan. Bantuan-bantuan ini termasuk pelatihan-pelatihan bagi para pejabat pemerintahan daerah dengan fokus pada investasi pemerintahan dalam infrastruktur masyarakat termasuk proses pemeliharaan.

Masyarakat membangun jalan untuk desa Koendrafa, Kecamatan Lolomatua. Foto: Juni Sembiring, AusAID.



Transisi menuju pembangunan berkelanjutan

Rekonstruksi kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami hampir selesai dan kualitas infrastruktur di Aceh telah mencapai tingkat yang sebanding dengan situasi sebelum bencana tersebut menghantam. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu terus dikerjakan untuk memastikan Aceh memiliki kesempatan pulih sepenuhnya.

Situasi keamanan telah meningkat secara signifikan menyusul perjanjian perdamaian pada 2005 dan masyarakat merasa optimis, terutama dengan peningkatan yang signifikan dalam hal pendanaan pemerintah yang mengalir ke propinsi tersebut. Namun demikian, tetap ada kekhawatiran terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi serta terbatasnya penyediaan pelayanan pemerintah menyusul terjadinya konflik sipil selama 30 tahun.

Menjelang akhir dari proses rekonstruksi tersebut, Pemerintah Australia masih tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Aceh untuk mendukung perdamaian dan kesejahteraan jangka panjang. Selama lima tahun ke depan, Australia akan memberikan hingga \$50 juta untuk mendanai propinsi NAD untuk membantu memperkuat pemberian pelayanan dan membangun peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masa depan yang damai dan sejahtera.

Australia akan mendukung pemerintahan yang mempunyai kepedulian yang sama dan pendekatan donor untuk memberikan bantuan perdamaian dan pembangunan di Aceh. Hal ini termasuk dukungan kepada strategi bersama pemerintah dan negara donor, dengan memfokuskan berbagai upaya untuk menjamin bahwa pendanaan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Australia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan negara-negara donor lainnya untuk membantu pemerintah daerah di Aceh menyediakan layanan yang lebih baik dan memperkuat proses-proses yang demokratis. Hal ini akan termasuk membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan mereka bagi para warganya, dengan membantu warga untuk meminta tata pemerintahan yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Australia juga akan meningkatkan keberhasilan program pendidikan pasca tsunami tersebut untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik di Aceh. Ini dilakukan dengan bekerja secara terus menerus di daerah-daerah yang terdampak konflik untuk membangun kembali sekolah-sekolah dan mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Untuk mendukung upaya-upaya perdamaian dan stabilitas jangka panjang, Australia juga akan fokus pada penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk para wanita yang secara tradisional terabaikan dari tempat kerja.³

Australia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan negara-negara donor lainnya untuk membantu pemerintah daerah di Aceh menyediakan layanan yang lebih baik dan memperkuat proses-proses yang demokratis.

³ Kerangka kerja Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Aceh 2008-13 tersedia di: <http://www.aisaid.gov.au/country/cntryrel.cfm?CountryID=30&Region=EastAsia>

Australia akan bercermin pada kesuksesan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat di dalam program rekonstruksi Australia untuk meningkatkan tata pemerintahan—membantu pemerintah memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dan organisasi-organisasi yang mewakili akan didukung untuk mengidentifikasi, merumuskan dan mengkomunikasikan kebutuhan mereka kepada pemerintah. Foto: AusAID

Australia mendukung perdamaian dan pembangunan di Aceh

Dampak ganda dari tsunami dan konflik sipil selama 30 tahun membuat Aceh menjadi salah satu propinsi termiskin di Indonesia.

Setelah tsunami, Australia membangun kembali fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan serta berbagai balai desa di tengah-tengah masyarakat, mendukung rekonstruksi perumahan melalui pemetaan lahan, memperkuat berbagai proses demokrasi dan meningkatkan penyediaan pelayanan pemerintahan.

Pada Juni 2008, Perdana Menteri Kevin Rudd mengumumkan inisiatif \$50 juta untuk mendukung perdamaian dan pembangunan di Aceh. Ini merupakan bagian dari kemitraan pembangunan lima tahun baru antara Australia dan Indonesia.

Dalam lima tahun ke depan, bantuan Australia di Aceh akan terkait dengan:

- > penyediaan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh
- > investasi pada sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Aceh
- > membantu pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih baik
- > membantu anggota masyarakat, termasuk perempuan, untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan dan proses-proses demokrasi
- > mendorong Aceh yang aman dan damai.

Komitmen jangka panjang Australia untuk Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemitraan pembangunan kami dengan Indonesia. Ini menandai transisi dari program rehabilitasi Australia di Aceh menuju komitmen berkesinambungan untuk pembangunan jangka panjang di propinsi tersebut.



